

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Harker, 2000). Menurut Todaro (1995) dalam Belascu & Horobet (2015) Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sehingga muncul berbagai upaya dilakukan oleh pemangku kepentingan guna meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah salah satu bentuk dari upaya yang telah disebutkan diatas yaitu pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru di dalam daerah tersebut (Pezzey, 2015). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Dianta, 2015). Selain memiliki tujuan dalam upaya pembangunan ekonomi juga harus memiliki strategi, hal ini dikarenakan untuk memberikan arah jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi tersebut. sehingga pembangunan ekonomi bukan hanya hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tetapi juga sebagai alat dalam menjalankan tujuan tersebut agar memiliki manfaat jangka panjang.

Strategi Pengembangan ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah lain akan memiliki jenis, karakteristik, dan cara yang berbeda (Rademaekers et al., 2012). Upaya yang dilakukan dalam pengembangan wilayah tergantung pada potensi dan kebutuhan setiap wilayah. Sehingga diperlukan kajian terhadap karakteristik yang melekat dalam suatu wilayah, hal ini berguna untuk membedakan konsep dan pengambilan keputusan yang akan diterapkan dalam pengembangan ekonomi.

Adanya perbedaan strategi pengembangan wilayah menyebabkan perbedaan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah. Perbedaan strategi ini diterapkan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut, dengan kata lain pengembangan di setiap wilayah pastinya akan memiliki karakter tersendiri (Fauziana, Mulyaningsih, Anggraeni, M, & Rofida, 2014). Sehingga dari hal ini akan muncul wilayah dengan perkembangan ekonomi yang baik atau prospektif dan wilayah dengan perkembangan ekonomi yang kurang baik atau non-prospektif.

Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu konsumsi, investasi, pembiayaan pemerintah, dan neraca perdagangan (Harker, 2000:10-12). Melambatnya perekonomian akibat neraca perdagangan menjadikan Investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian (Reza, Hamed, & Amaneh, 2011). Sehingga kunci dalam pengembangan perekonomian suatu daerah adalah dilihat dari iklim investasi yang masuk ke dalam daerah tersebut.

Menurut Kachu (2002:2) dan Pezzey (2015:14) Investasi atau sering disebut penanaman modal sendiri merupakan suatu kegiatan yang membawa perubahan ekonomi yang cukup luas yaitu meningkatkan jumlah barang dan jasa, menciptakan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat daerah, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Menurut Kachu (2002:2) menyatakan bahwa kegiatan penanaman modal selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, penanaman modal juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan akan bermanfaat bagi peningkatan fiskal daerah. Sedangkan menurut Pezzey (2015:14) berpendapat konsep dasar penanaman modal adalah diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat, untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang kondusif diantaranya ialah adanya kepastian, kestabilan dan keamanan, stabilitas makro ekonomi (inflasi, kurs, suku bunga, dll), penyediaan infrastruktur, dan setiap daerah harus menjamin kerjasama sinergis antar daerah. Sehingga kegiatan penanaman modal atau investasi sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu target pengembangan wilayah investasi di Jawa Tengah, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar dalam pengembangan investasi khususnya manufaktur dan pariwisata yang sesuai dengan program Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Selain itu data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan kecenderungan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017 yaitu 6,05% naik menjadi 6,34%, Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,28 pada tahun 2016-2017. Selain itu target investasi PMDN tahun 2018 mencapai 21% dari target yang telah ditentukan yaitu Rp. 290.000.000.000 dengan penyerapan tenaga kerja 899 orang, sedangkan untuk target investasi PMA sebesar Rp. 10.012.480.000 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 93 orang.

Atas dasar kecenderungan lain Kabupaten Banyumas memiliki posisi yang strategis ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Banyumas merupakan wilayah pengumpul, hal ini dibuktikan dengan adanya kemudahan akses menuju Kabupaten Banyumas, terutama dengan menggunakan moda transportasi darat dan udara. Jika dilihat dari posisinya kemungkinan besar peluang untuk pengembangan ekonomi wilayah sangat pesat, karena Banyumas sendiri terletak berdekatan dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat sebab keberadaan pelabuhan dan bandara. Selain itu letak Banyumas sendiri juga berdekatan dengan pusat kegiatan wilayah yaitu Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Cirebon.

Upaya untuk mendorong perkembangan investasi Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan potensi yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukannya instrumen-instrumen yang baik agar perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi berkembang lebih pesat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal. Oleh

karena itu diperlukannya cara atau upaya yang dapat meningkatkan iklim investasi Kabupaten Banyumas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kurang berkembangnya minat investor dalam kegiatan penanaman modal Kabupaten Banyumas menyebabkan beberapa daerah di Banyumas menjadi kurang berkembang. Sedangkan apabila dilihat dari potensi Banyumas memiliki peluang tinggi dalam pengembangan investasi. Upaya untuk mendorong perkembangan investasi Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan potensi daerah belum cukup, oleh karena itu diperlukannya instrumen-instrumen yang baik agar perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi berkembang lebih pesat. Salah satu instrumen dalam mendorong iklim investasi adalah dengan cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal (Ślusarczyk, 2018).

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tergolong masih rendah. Hal ini berakibat pada penurunan daya saing daerah, padahal untuk menarik penanaman modal diperlukan daya tarik dari segi kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal disusun untuk menjawab permasalahan terkait belum adanya kebijakan atau regulasi daerah yang mengatur tentang insentif dan kemudahan penanaman modal. Sehingga strategi pengembangan penanaman modal dapat dilihat dari sisi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.

Sehingga pertanyaan penelitian (*reasearch qestion*) yang dimunculkan sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan dilatar belakang adalah “*Bagaimana jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal yang dapat dilakukan di sasaran wilayah investasi Kabupaten Banyumas?*”

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Tujuan dan sasaran dari penelitian adalah akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

#### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Tahapan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah:

- a. Identifikasi potensi pendukung kegiatan penanaman modal Kabupaten Banyumas
- b. Identifikasi kesesuaian lahan Kabupaten Banyumas
- c. Identifikasi aktivitas penanaman modal
- d. Analisis tipologi wilayah penanaman modal Kabupaten Banyumas
- e. Analisis prioritas jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal pada sasaran wilayah investasi Kabupaten Banyumas

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan terhadap wilayah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan terhadap materi yang menjadi batasan dalam kajian penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyumas dengan luas 1.335 Km<sup>2</sup> dan memiliki 27 Kecamatan. Berdasarkan posisi geografisnya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang
- Sebelah selatan : Kabupaten Cilacap
- Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara



**Gambar I-1** Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

*Sumber: tanahair.indonesia.go.id, 2011*

### 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai beberapa pokok bahasan yang terkait dengan tema penelitaian. Hal ini dikarenakan untuk membatasi kajian agar lebih terarah serta efektif dalam penulisan penelitian ini. Adapun ruang lingkup substansi yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

- **Membahasan sasaran wilayah yang akan diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal**

Dalam pembahasan wilayah yang akan dijadikan sebagai sasaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal akan dianalisis dengan GIS. Pada penentuan sasaran wilayah yang akan diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal perlu memeperhatikan data kesesuaian lahan dan potensi wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan wilayah dan pemberian kebijakan insentif dan kemudahan penenman modal. Sehingga hasil dari olahan informasi berbasis spasial ini akan dihasilkan tipologi wilayah investasi.

- **Membahas potensi ekonomi wilayah**

Pembahasan tentang potensi ekonomi wilayah diperlukan dalam melihat potensi ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, serta melihat seberapa potensi tersebut akan dapat mendorong proses pembangunan di Kabupaten Banyumas. Potensi ekonomi wilayah dilihat menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketersediaan infrastruktur, potensi sumberdaya, kondisi sosial dan budaya, serta aspek kebijakan.

- **Strategi pengembangan kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal**

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pada penyelenggaraan kegiatan penanaman modal diperlukannya kebijakan yang dapat menstimulasi masuknya pemodal, kebijakan yang dimaksud adalah pemnerian insentif dan

kemudahan penanaman modal. Dalam substansi ini akan membahas mengenai bagaimana kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal dapat mendorong iklim investasi di suatu daerah.

- **Menganalisis jenis dan bentuk insentif-kemudahan penanaman modal**

Jenis dan Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman modal merupakan output dalam penelitian ini. Jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal akan diberikan berdasarkan klasifikasi wilayah sasaran investasi. Adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditujukan untuk mendorong iklim penanaman modal agar berkembang lebih pesat, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat meningkat.

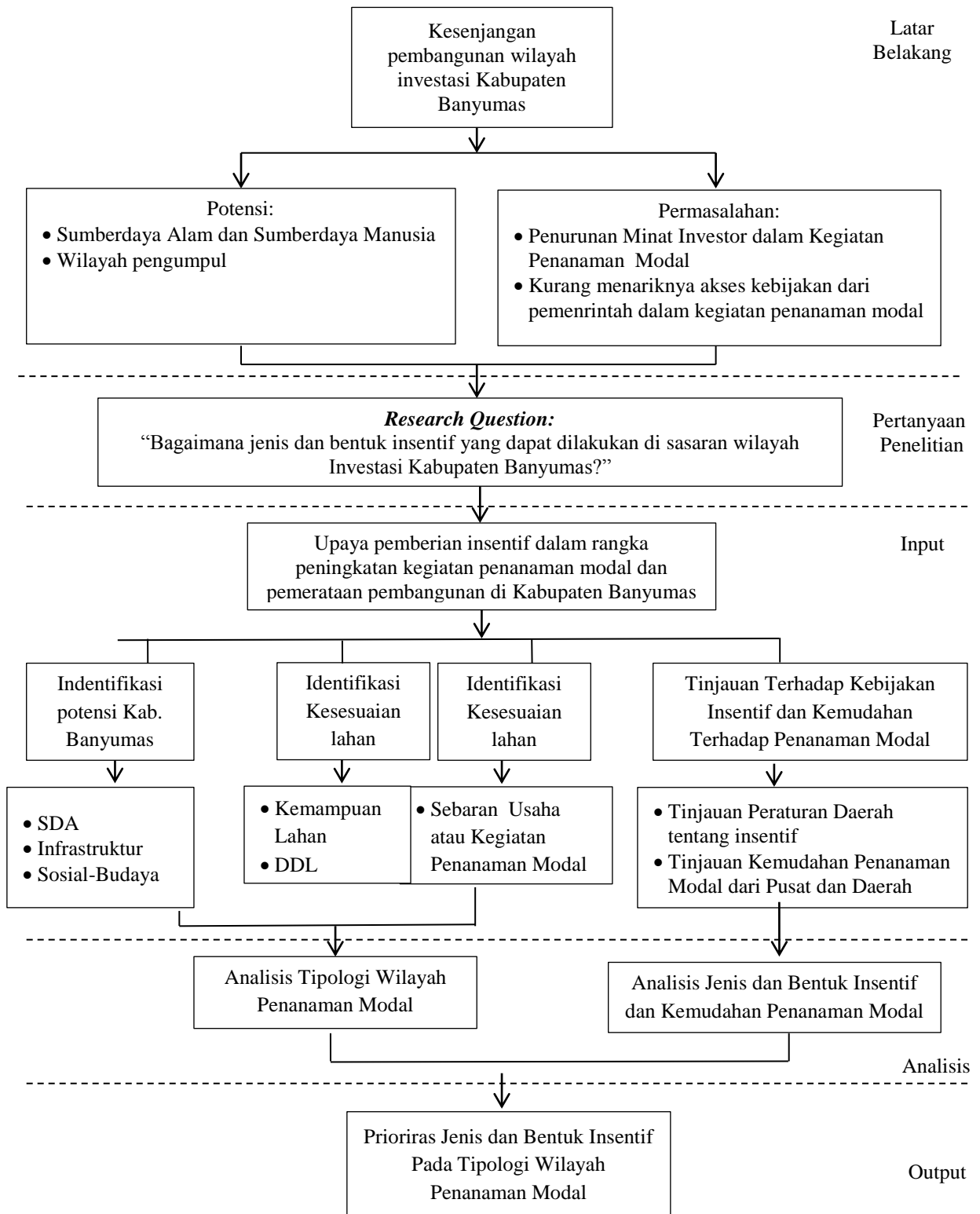
### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tentang kajian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah:

- a. Teoritis pengembangan Ilmu Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK)  
Efisiensi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih mendalam lagi dalam pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, sehingga didapat pengetahuan baik dalam upaya mewujudkan pengembangan wilayah dan kota.
- b. Kelayakan pembangunan ekonomi wilayah  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk memberikan masukan bagi pihak yang lain berkompeten terhadap kajian bentuk dan jenis insentif serta kemudahan penanaman modal pada sasaran wilayah investasi Kabupaten Banyumas, sebagai arahan dan strategi dalam kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta memberikan rekomendasi atau usulan terkait upaya yang tepat dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.



## 1.6 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar I-2 Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: Hasil Analisis, 2019*

## **1.7 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data secara ilmiah dengan tujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Dalam melakukan kegiatan penelitian terhadap “kajian bentuk dan jenis pemberian insentif serta kemudahan penanaman modal pada sasaran wilayah investasi kabupaten banyumas” untuk menunjang proses analisis maka dibutuhkan pendekatan dan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

### **1.7.1 Definisi Operasional Penelitian**

Definisi operasional penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan ataupun menspesifikan kegiatan untuk mengukur kegiatan penelitian tersebut (Nasir, 2004). sedangkan menurut Wilonoyudho (2003) definisi operasional adalah suatu atribut atau nilai yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga definisi operasional merupakan panduan dan tolak ukur bagi peneliti dalam suatu kegiatan agar penelitian berjalan sesuai dengan spesifikasi kegiatan dan memperoleh kesimpulan sesuai dengan apa telah ditetapkan sebelumnya.

Pembahasan tentang definisi operasional ditujukan untuk mengetahui dan menjelaskan istilah kata atau variabel yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Variabel-variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah semua variabel yang terkait dalam rumusan hipotesis. Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan persepsi terhadap variabel-variabel yang akan disintesa maka akan diberikan batasan terhadap variabel-variabel berikut ini:

1. Kegiatan Investasi atau Penanaman Modal adalah salah satu strategi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal. Sehingga keterkaitan antara kegiatan investasi atau penanaman modal dengan pembangunan daerah adalah perubahan terhadap taraf hidup dan perekonomian daerah.

2. Pengembangan wilayah merupakan usaha yang dilakukan oleh stakeholder yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan wilayah adalah dilihat dari adanya kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah tersebut. Sehingga pengembangan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah.
3. Tipologi Wilayah Investasi pada hakekatnya melakukan pemertaan kesesuaian lahan terhadap kegiatan investasi, mendata potensi wilayah sebagai pendukung kegiatan investasi, dan mendata seberapa besar kegiatan investasi yang masuk pada wilayah tersebut. sehingga dari hasil rekapitulasi ini akan diketahui beberapa klasifikasi wilayah yang menjadi sasaran wilayah investasi.
4. Insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah strategi dalam peningkatan kegiatan atau iklim investasi yang masuk ke dalam suatu daerah. Pemberian insentif memiliki tujuan untuk menarik investasi baru atau mempertahankan fasilitas yang ada di wilayah tersebut.

### **1.7.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan jenis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai langkah peningkatan iklim investasi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data dan analisis yang digunakan untuk mengkaji tentang pemberian referensi insentif dan kemudahan penanaman modal bersifat kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah titik potensi pendukung investasi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, kesesuaian lahan, kemampuan lahan, dan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Tahapan yang dilakukan sebelum menganalisis kajian jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal adalah peneliti harus menemukan terlebih dahulu klasifikasi wilayah yang akan di berikan

insentif. Tahapan tersebut disebut sebagai analisis tipologi wilayah investasi, setelah itu peneliti akan melakukan kajian jenis dan bentuk yang diperoleh dari jawaban pada expert melalui metode analytical hierarchy process. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan memuat 2 analisis yaitu terkait kewilayahan yaitu tipologi wilayah investasi dan substansional yaitu kajian jenis dan bentuk insentif.

### **1.7.3 Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari olahan data-data kuantitatif yaitu meliputi tata guna lahan, rawan bencana, hidrologi, kondisi penanaman modal wilayah, ketersediaan sumberdaya alam, dan ketersediaan infrastruktur. Data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan sasaran wilayah yang akan diberikan insentif atau kemudahan penanaman modal. Data kuantitatif lainnya adalah , peraturan tentang penanaman modal, dan peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang digunakan untuk menganalisis referensi pilihan insentif atau kemudahan penanaman modal yang akan diberikan kepada investor.

Data tipologi wilayah investasi dibutuhkan untuk mengetahui wilayah mana yang akan diberikan kebijakan insentif maupun kemudahan penanaman modal. Pada analisis tipologi kawasan ini akan mengkomparasikan karakteristik wilayah dan potensi wilayah. Sehingga menghasilkan output pembagian wilayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Data tinjauan kebijakan digunakan untuk mengetahui jenis-jenis dan bentuk yang akan diberikan dalam kegiatan penanaman modal. Tujuan dari dilakukannya tinjauan terhadap kebijakan adalah untuk penyesuaian terhadap kemampuan dinas atau lembaga terkait dalam memberikan dorongan agar iklim investasi di wilayahnya berkembang cepat. Output dari dilakukannya tinjauan kebijakan ini adalah penantuan referensi yang akan diberikan sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan terkait. Pemilihan referensi ini akan dilakukan berdasarkan pendapat bidang udara dan dinas

atau kelembaga terkait. Sehingga akan terjadi dua komparasi antara penerima dan pemberi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi wilayah.

**Tabel I-1 Data Penelitian**

Sasaran	Variabel	Nama Data	Tahun	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan	Sumber
Analisis sasaran wilayah yang akan penerima insentif dan kemudahan penanaman modal	Tipologi Wilayah Investasi	Tata Guna Lahan	Terbaru	Sekunder	Peta	GIS	RTRW Kab. Banyumas
		Rawan Bencana	Terbaru	Sekunder	Peta	GIS	Ina-Geoportal
		Hidrologi	Terbaru	Sekunder	Peta	GIS	Ina-Geoportal
		Ketersediaan SDA	Terbaru	Sekunder	Peta dan Deskripsi	Telaah Dokumen dan Google Earth	BPS , Lapangan
		Ketersediaan Infrastruktur	Terbaru	Sekunder	Peta dan Deskripsi	Telaah Dokumen dan Google Earth	BPS , Google Earth
		Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal	Terbaru	Sekunder	Peta dan Deskripsi	Telaah Dokumen dan Google Earth	BPS , Google Earth
review kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah ada	Peraturan atau Kebijakan	Peraturan Tentang Penanaman Modal	Terbaru	Sekunder	Deskripsi	Telaah Dokumen	UU No. 25 Thun 2007 Tentang Penanaman Modal dan PP No. 16 Tahun 2012 Tentang RUPM
		Peraturan Tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terbaru	Sekunder	Deskripsi	Telaah Dokumen	PP No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif
Analisis referensi pilihan jenis dan bentuk insentif-kemudahan penanaman modal yang akan diberikan kepada wilayah pengembangan	Rererensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jenis Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan direkomendasikan	Terbaru	Sekunder	Deskripsi	Kuisisioner	expert choice
		Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman	Terbaru	Sekunder	Deskripsi	Kuisisioner	expert choice

Sasaran	Variabel	Nama Data	Tahun	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan	Sumber
Investasi		Modal yang akan direkomendasikan					

*Sumber: Analisis Peneliti, 2020*

#### 1.7.4 Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, fenomena tersebut dinamakan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis atau sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, maka data yang dikumpulkan harus teruji kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan GIS, kuisisioner dan expert choice sebagai instrumen penelitian.

##### 1. GIS

Sistem informasi geospasial digunakan untuk menemukan sasaran wilayah investasi. Output yang dihasilkan dalam pengolahan data menggunakan GIS ini adalah Klaster wilayah investasi yang terbagi menjadi 4 klaster wilayah yaitu wilayah berkembang pesat, wilayah

##### 2. Kuisisioner

Kuisisioner ditujukan untuk kepada pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan prioritas bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal dari beberapa kriteria dan alternatif yang telah diperoleh dari review jurnal dan literatur lainnya.

##### 3. Expert Choice

Expert choice merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu perhitungan dengan menggunakan metode AHP. Selain itu dipergunakan sebagai alat bantu untuk menampilkan hasil analisis dari data perbandingan antara kriteria dan alternatif yang telah diperoleh dari review jurnal dan literatur.

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sasaran wilayah investasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder, seperti kesesuaian lahan, kemampuan lahan, sebaran potensi wilayah, dan sebaran kegiatan investasi. Selain itu data-data juga diperoleh dari dokumen-dokumen referensi terkait kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan pihak-pihak pengambil keputusan terhadap kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan pemberian bentuk dan jenis Insentif maupun kemudahan penanaman modal pada sasaran wilayah investasi melalui kuisisioner. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian:

a. Searching

Searching proses pencarian data dari sekumpulan data yang tersedia di web search, pencarian ini sering disebut dengan table look-up atau store and retrieval information. Dalam penelitian dilakukan searching untuk mengetahui Sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Banyumas, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi penanaman modal Banyumas. Kegiatan observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kajian yang digunakan untuk pengembangan investasi dan bentuk serta jenis yang akan diberikan. Pengumpulan Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian dokumen yang didapatkan melalui survei ke instansi berupa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Pertanyaan yang digunakan biasanya berupa pertanyaan tertulis yang nantinya akan diisi oleh responden. Kuisisioner yang telah dilengkapi diberikan kembali kepada peneliti. Kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data secara efisien dan efektif. Dalam pengumpulan data menggunakan

kuisisioner variabel yang digunakan telah jelas serta telah terdapat pilihan jawabannya. Dalam penggunaan kuisisioner untuk populasi yang besar maka dapat digunakan sample yang dapat mewakili responden secara umum. Kuisisioner digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan berdasarkan jawaban responden, yaitu Pemerintah, Badan Usaha, ataupun masyarakat yang memiliki usaha di daerah tersebut.

c. Telaah Dokumen

Pengumpulan data sekunder dengan telaah dokumen dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini studi dokumen instansi ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui kondisi dan perkembangan investasi yang masuk di Kabupaten Banyumas dan juga bagaimana realisasi dari investasi tersebut. selain itu telaah dokumen dilakukan untuk mengetahui jenis dan bentuk insentif dan kemudahan yang biasa diberikan di daerah.

#### **1.7.6 Penentuan Narasumber Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013) metode populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Pengambilan jumlah sampel dari populasi memiliki aturan atau memiliki teknik tersendiri. Adanya teknik ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi. Terdapat 2 teknik penarikan sampel dari populasi yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.



Pada penelitian ini digunakan teknik *non probability sampling* dimana pengambilan sampel memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota dalam populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana sampel dipilih dari elemen populasi secara acak dan setiap anggota populasi memiliki hak yang sama untuk dijadikan sampel.

Menurut Kurniawan (2009) mengungkapkan bahwa AHP dapat digunakan untuk kepentingan individual ataupun dipakai dalam sebuah kelompok dengan memakai kuisioner yang sama. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan kriteria expert dan sering timbulnya keragu-raguan akan kualitas seorang *expert*, membuat proses pengambilan keputusan dengan metode AHP ditetapkan lebih dari satu *expert*. Selain untuk mengurangi terjadinya ketidakjelasan kriteria dan kualitas expert dan untuk mendapatkan persepsi dari berbagai sudut pandang maka responden untuk mengisi kuisioner persepsi AHP dikategorikan menjadi 2 sudut pandang yaitu dari sudut pandang pemberi kebijakan (dinas) dan yang menerima kebijakan (pengusaha). Dari sudut pandang pemberi kebijakan ditetapkan sebanyak 5 lembaga/ instansi secara *Judgment*.

Terdapat sedikit kendala dalam penentuan expert dari klasifikasi pengusaha, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi terdampak covid-19 yang mengakibatkan narasumber atau expert tidak mau ditemui. Sehingga peneliti mengambil kebijakan sebagian penentuan expert ini berdasarkan rekomendasi Kadin dan secara *accidental sampling*. Berikut adalah daftar expert yang berpartisipasi dalam penelitian ini:

**Tabel I-2 Daftar Expert**

No.	Instansi/ Lembaga	Lokasi	Bidang Usaha	Kode	Tipologi Wilayah
1.	DPMPSTP	Kec. Purwokerto Timur	Instansi Pemerintah	R1	Maju
2.	DISPERINDAG	Kec. Purwokerto Timur	Instansi Pemerintah	R2	Maju
3.	DINAS UMKM	Kec. Purwokerto Utara	Instansi Pemerintah	R3	Terbelakang
4.	BAPPEDA	Kec. Purwokerto	Instansi Pemerintah	R4	Maju

No.	Instansi/ Lembaga	Lokasi	Bidang Usaha	Kode	Tipologi Wilayah
		Timur			
5.	Dinas Pariwisata	Kec. Purwokerto Timur	Instansi Pemerintah	tidak bisa berpartisipasi	Maju
6.	KADIN	Kec. Sokaraja	Organisasi	R5	Berkembang
7.	CV Karya Duta Teknik	Kec. Purwokerto Timur	Perdagangan Eceran, Khusus Makan, Minuman dan Tembakau	R6	Maju
8.	Intan Departemen Store	Kec. Purwokerto Barat	Perdagangan Besar	R7	Berkembang
9.	PT K24	Kec. Purwokerto Utara	Industri Kimia dan Farmasi	R8	Terbelakang
10.	PT Mitra Sehati Sekata	Kec. Purwokerto Selatan	Perdagangan dan Reparasi	R9	Maju
11.	PT Rejeki Sukses Sentosa	Kec. Kalibagor	Konstruksi Gedung	R10	Terbelakang
12.	CV Diantara Graffindo	Kec. Karanglewas	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta	R11	Berkembang
13.	CV Kartka Jaya	Kec. Kembaran	Konstruksi Jalan	R12	Berkembang
14.	KOPDIT SAE	Kec. Sumbang	Jasa Koperasi dan Pinjaman	R13	Potensial
15.	BUKEN	Kec. Sumbang	Jasa Pariwisata	R14	Potensial
16.	PT Indonesia Power	Kec. Cilongok	Jasa Kontruksi dan Kelistrikan	R15	Potensial
17.	CV Aspernas	kec. Jatilawang	Real Estate	R16	Berkembang
18.	CV Julia	Kec. Kebasen	Jasa Tour and Travel	R17	Berkembang
19.	CV Fajar Jaya	Kec. Tambak	Perdagangan dan Reparasi	R18	Berkembang
20.	CV Sendy Comotor	Kec. Patikraja	Perdagangan dan Reparasi	R19	Berkembang
21.	CV Rizky Jaya	Kec. Purwojati	Perdagangan dan Reparasi	R20	Terbelakang
22.	PT Cakra Inti Pesona	Kec. Sokaraja	Jasa Konstruksi	R21	Terbelakang
23.	PLTMH Logawa	Kec. Kedungbanteng	Jasa Kontruksi dan Kelistrikan	R22	Terbelakang
24.	CV Anugerah Mandiri	Kec. Jatilawang	Jasa Konstruksi	R23	Berkembang
25.	PT Pundi Kayu Indojaya	Kec. Ajibarang	Industri	R24	Berkembang

No.	Instansi/ Lembaga	Lokasi	Bidang Usaha	Kode	Tipologi Wilayah
26.	PT Satria Buana	Kec. Baturaden	Perdagangan dan Reparasi Mobil	R25	Maju
27.	BBPTU Baturraden	Kec. Baturraden	Pembibitan Hewan ternak	tidak bisa berpartisipasi	Maju
28.	Japfa Comffed	Kec. Wangon	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	tidak bisa berpartisipasi	Berkembang
29.	Rizqi Agung Perdasa	Kec. Tambak	Industri Kimia dan Farmasi	tidak bisa berpartisipasi	Berkembang
30.	Sinar Tambang Arthalestari	Kec. Jatilawang	Industri Semen	tidak bisa berpartisipasi	Berkembang
31.	Cahaya Karya Sentosa	Kec. Purwojati	Pergudangan	tidak bisa berpartisipa	Terbelakang
32.	Wisata Niaga Sejahtera	Kec. Karanglewas	Perhotelan	tidak bisa berpartisipa	Berkembang
33.	CV Senopati	Kec. Purwokerto Utara	Indsutri Pakaian	tidak bisa berpartisipa	Terbelakang
34.	Esa Daya Lestari	Kec. Purwokerto Timur	Real Estate	tidak bisa berpartisipa	Maju
35.	Cahaya Karya Sentosa	Kec. Baturraden	Perikanan	tidak bisa berpartisipa	Maju

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Pada Penelian Ini digunakan 2 metode yaitu Metode Tipologi Wilayah dengan bantuan GIS dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan tools Expert Choice. Berikut merupakan penjelasannya:

#### a. Metode Tipologi Wilayah Investasi

Setiap wilayah pasti mengalami masalah ketidak merataan pembangunan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa fakto yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, pola penyebaran infrastruktur, dan konsentrasi investasi daerah (Lay, 2003). Menurut Eka Raswita & Utama (2013) menyebutkan bahwa indikator ketidakmerataan itu terbagi atas, fisik yaitu ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian. Ekonomi yaitu Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing

kecamatan dan sosial yaitu jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan.

Beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas antar wilayah adalah Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, Alokasi investasi, Ketersediaan infrastruktur, Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarwilayah, Perbedaan SDA antar wilayah, Perbedaan demografis antar wilayah, dan Pola Perdagangan antar daerah (Tambunan, 2011). Sedangkan menurut (Lay, 2003) Indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana. Sehingga dalam penelitian ini diambil 3 parameter dalam penentuan tipologi wilayah investasi yaitu potensi pendukung, parameter fisik, dan kegiatan atau aktivitas investasi.

Berikut adalah tahapan dalam analisis tipologi wilayah Investasi:

- **Identifikasi Potensi Pendukung Kegiatan Investasi**

Identifikasi potensi pendukung merupakan parameter 1 dalam penentuan tipologi wilayah investasi. Tahap ini dianalisis menggunakan weighted overlay melalui arcgis, dimana setiap variabel akan diberi skor atau bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kegiatan investasi. berikut daftar variabel dan pembobotan dari parameter 1:

**Tabel I-3 Parameter Potensi Pendukung Kegiatan Investasi**

Jaringan Jalan	Klasifikasi (m)	Skor
	0-500	5
	500-1000	4
	1000-1500	3
	1500-2000	2
Pasar/ Pusat Perbelanjaan	Klasifikasi	Skor
	0-1000	5
	1000-3000	4
	3000-5000	3

	>5000	2
Stasiun	Klasifikasi	Skor
	0-200	5
	200-400	4
	400-1000	3
	>1000	2
Terminal	Klasifikasi	Skor
	0-200	5
	200-400	4
	400-1000	3
	>1000	2
Wisata	Klasifikasi	Skor
	0-1000	5
	1000-3000	4
	3000-5000	3
	>5000	2
Pertambangan	Klasifikasi	Skor
	0-400	5
	400-1000	4
	1000-2000	3
	>2000	2

Sumber: (Nugraha, Y., et al, 2014) dengan modifikasi

- **Identifikasi Kesesuaian Lahan Kegiatan Investasi**

Identifikasi kesesuaian lahan untuk kegiatan investasi merupakan parameter ke-2 dalam proses analisis tipologi wilayah investasi. Pada parameter 2 ini terdapat 4 variabel atau indikator yaitu rawan bencana, kelerengan, Tata Guna Lahan dan Hidrogeologi. berikut adalah indikator serta skoring pada identifikasi kesesuaian lahan:

**Tabel I-4 Parameter Kesesuaian Lahan Kegiatan Investasi**

Rawan Bencana	Klasifikasi	Skor
	Sangat Tinggi	5
	Tinggi	4
	Sedang	3

	Rendah	2
Tata Guna Lahan	Klasifikasi	Skor
	Sangat Sesuai	5
	Sesuai	4
	Sedang	3
	Rendah	2
Kemiringan Lereng	Klasifikasi	Skor
	0-8%	5
	8-15%	4
	15-25%	3
	25- <40%	2
	<40%	1
Hidrogeologi	Klasifikasi	Skor
	akuifer produktif dengan penyebaran luas	5
	akuifer produktif penyebaran sedang	4
	Akuifer produktif kecil dan setempat	3
	daerah air langka	2

Sumber: (Taufiqurrahman, et al, 2015) dengan modifikasi

- **Identifikasi Aktivitas Penanaman Modal**

Identifikasi aktivitas penanaman modal merupakan parameter ke-3 dalam penentuan tipologi wilayah investasi. Parameter 3 ini akan menunjukkan wilayah dengan dominasi aktivitas penanaman modal, bisa dilihat dari banyaknya kegiatan investasi dan sebaran investasinya. Kemudian parameter ke-3 ini dianalisis menggunakan weighted overlay dan akan menghasilkan peta sebaran aktivitas penanaman modal.

- **Analisis Tipologi Wilayah Investasi**

Penentuan tipologi wilayah investasi Kabupaten Banyumas ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu perhitungan skoring karakteristik fisik wilayah yang terdiri dari pembobotan kesesuaian lahan dan potensi wilayah, dari 2 (dua) parameter ini akan menghasilkan peta karakteristik fisik wilayah investasi. Berikut adalah tabel yang menggambarkan analisis karakteristik wilayah investasi:

Kesesuaian Potensi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Sangat Tinggi				
Tinggi				
Sedang				
Rendah				

Langkah selanjutnya adalah pembobotan terhadap aktivitas penanaman modal yang telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Tiga parameter ini kemudian dilakukan overlay dengan 4 klasifikasi yang akhirnya menjadi tipologi wilayah yang telah disebutkan diatas. Pertama adalah wilayah maju pesat, dimana pada wilayah ini memiliki nilai bobot setiap parameternya yang tinggi sampai sangat tinggi. kedua adalah wilayah potensial dimana wilayah ini memiliki nilai

bobot tinggi pada parameter karakteristik fisik wilayah sedangkan untuk parameter aktivitas investasi nilai bobotnya cenderung sedang sampai rendah. Ketiga adalah wilayah berkembang yaitu wilayah dengan nilai bobot tinggi pada parameter aktivitas investasi, sedangkan nilai parameter fisik cenderung rendah. Terakhir adalah wilayah terbelakang dimana nilai bobot pada setiap parameternya rendah. Berikut adalah tahap penentuan analisis tipologi wilayah investasi Kabupaten Banyumas:

**Tabel I-2 Metode Tipologi Wilayah Pengembangan Investasi**

<b>Fisik</b>	<b>Wilayah Maju</b>	<b>Wilayah Potensial</b>	<b>Wilayah Berkembang</b>	<b>Wilayah Terbelakang</b>
<b>Aktivitas Investasi</b>				
<b>Wilayah Maju</b>				
<b>Wilayah Potensial</b>				
<b>Wilayah Berkembang</b>				
<b>Wilayah Terbelakang</b>				

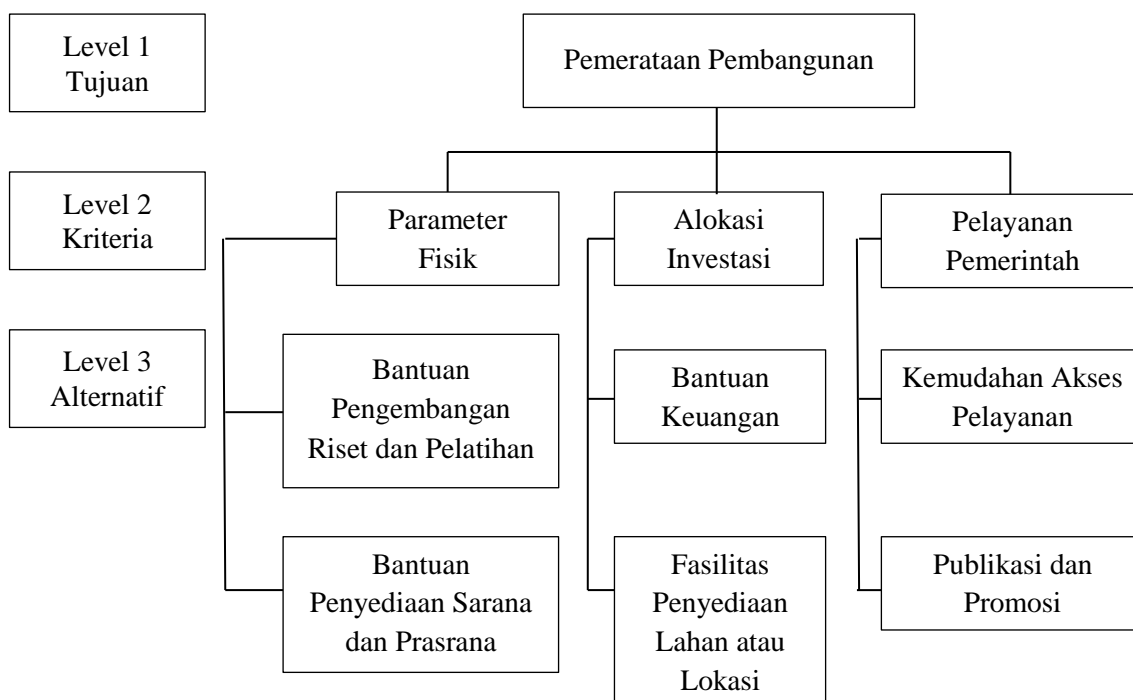
*Sumber: Analisis Peneliti, 2020*

**b. Analytical Hierarchy Process (AHP)**

Menurut Saaty (1993) dalam Sasongko, Astuti, & Maharani (2017) AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Metode ini digunakan untuk menganalisis referensi pilihan bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan menjadi tujuan penelitian ini. Berikut merupakan proses dan tahapan yang akan dilakukan dalam analisis ini:



#### 4. Identifikasi tujuan dan penyusunan hirarki



#### 5. Menghitung tingkat kepentingan kriteria

Penentu Pemerataan Pembangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penentu Pemerataan Pembangunan
Parameter Fisik																		Alokasi Investasi
Parameter Fisik																		Pelayanan Pemerintah
Alokasi Investasi																		Pelayanan Pemerintah

#### Keterangan:

Bobot nilai yang dipakai dalam pertanyaan-pertanyaan ini diberikan definisi verbal sebagai berikut:

Nilai Bobot = 1 artinya "Sama Pentingnya"

Nilai Bobot = 3 artinya "Sedikit Agak Penting"

Nilai Bobot = 5 artinya "Lebih Penting"

Nilai Bobot = 7 artinya "Sangat Penting"

Nilai Bobot = 9 artinya "Mutlak Penting"

Nilai Bobot = 2, 4, 6 dan 8 "Ragu-ragu" dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7.

## 6. Menghitung Tingkat Kepentingan Alternatif

Tujuan	AL.1	AL.2	AL.3	AL.4	AL.5	AL.6	(TPV) Local Priority
AL.1	AL.1/AL.1	AL.1/AL.2	AL.1/AL.3	AL.1/AL.4	AL.1/AL.5	AL.1/AL.6	
AL.2	AL.2/AL.1	AL.2/AL.2	AL.2/AL.3	AL.2/AL.4	AL.2/AL.5	AL.2/AL.6	
AL.3	AL.3/AL.1	AL.3/AL.2	AL.3/AL.3	AL.3/AL.4	AL.3/AL.5	AL.3/AL.6	
AL.4	AL.4/AL.1	AL.4/AL.2	AL.4/AL.3	AL.4/AL.4	AL.4/AL.5	AL.4/AL.6	
AL.5	AL.5/AL.1	AL.5/AL.2	AL.5/AL.3	AL.5/AL.4	AL.5/AL.5	AL.5/AL.6	
AL.6	AL.6/AL.1	AL.6/AL.2	AL.6/AL.3	AL.6/AL.4	AL.6/AL.5	AL.6/AL.6	
Jumlah							

Dari perhitungan tingkat kepentingan alternatif ini maka akan diperoleh Local Priority

## 7. Menghitung *Local Consistency*

AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR), yang dirumuskan:

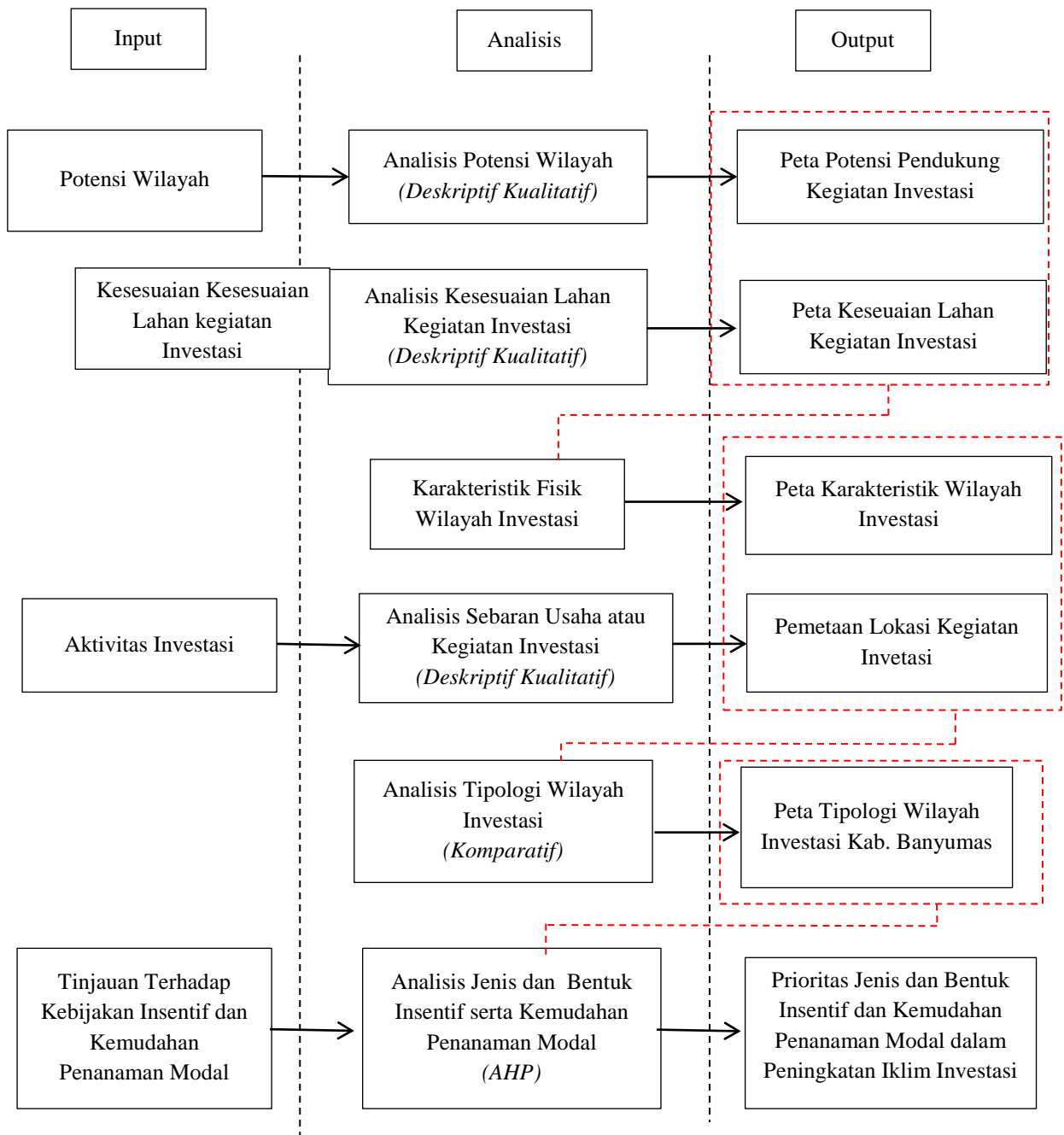
$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana :

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

Menurut Saaty (1993) juga menyatakan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari sama dengan 0,1 (10%). Jika tidak, maka penilaian yang telah dibuat mungkin dilakukan secara random dan perlu direvisi.

### 1.7.8 Kerangka Analisis



**Gambar I-3 Kerangka Analisis Penelitian**

*Sumber: Hasil Analisis, 2019*

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian terdiri dari 5 (Lima) bab, adapun penjelasan dari masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB 2 KAJIAN LITERATUR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS**

Bab ini menjabarkan kajian literatur terkait perspektif pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Mulai dari penentuan wilayah yang menjadi sasaran pemberian insentif dan kemudahan, konsisi perekonomian dan investasi Kabupaten Banyumas, kebijakan yang mengatur insentif dan kemudahan penanaman modal, dan kendala pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

### **BAB 3 WILAYAH SASARAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS**

Bab ini menjelaskan gambaran umum wilayah yang akan menjadi sasaran pemberian investasi melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

### **BAB 4 ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH DAN KAJIAN PEMBERIAN BENTUK SERTA JENIS INSENTIF-KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS**

Bab ini akan menyajikan hasil analisis yang telah diperoleh oleh peneliti diantaranya adalah klasifikasi wilayah yang akan dijadikan sasaran pemberian bentuk dan jenis insentif serta kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas. Bentuk dan jenis insentif yang diberikan akan sesuai dengan klasifikasi wilayah yang telah dianalisis sebelumnya.

### **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang telah diperoleh selama penelitian.